

# Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Komitmen Aparatur, Kepatuhan Pada Regulasi Terhadap Kinerja Aparatur Daerah

## The Effect of Accountability, Transparency, Apparatus Commitment, and Compliance with Regulations on Regional Apparatus Performance

M. Sulkhanul Umam<sup>1</sup>, Anita Dewi Setiyowati<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup>Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia

### ARTICLE INFO

**Article History:**

Received 31 March 2023

Revised 23 June 2023

Publish 26 June 2023

**Keywords:**

Accountability, Organizational Commitment, Regulatory Compliance, Transparency

**Corresponding Author:**

Sulkhanul.umam@upy.ac.id

**DOI:**

<https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19551>

### ABSTRACT

Government agencies are a means of realizing public welfare so that institutions are continuously required to improve performance. Bantul Regency in the 2021 fiscal year received an audit opinion from BPK, but there are still various problems regarding regional financial management, and based on the Indonesian Governance Index (IGI), the performance report of Bantul Regency has decreased in performance from the previous year. This study was conducted to determine the effect of accountability, transparency, organizational commitment, and compliance with regulations on the performance of the Bantul Regency regional apparatus. This research is quantitative, using primary data with a questionnaire as a data mining instrument. The data analysis model uses multiple linear regression which is processed with SPSS software version 25.0. The results of the study prove that accountability, transparency, and organizational commitment significantly affect the performance of the Bantul Regency regional apparatus. Meanwhile, compliance with regulations does not affect the performance of the Bantul Regency Regional Government.

### ABSTRAK

Instansi pemerintah merupakan sarana dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. sehingga instansi terus dituntut untuk meningkatkan kinerja. Kabupaten Bantul pada tahun anggaran 2021 mendapatkan opini audit dari BPK, namun masih terdapat berbagai permasalahan mengenai pengelolaan keuangan daerah serta Berdasarkan Indonesian Governance Indeks (IGI) Laporan Kinerja Kabupaten bantul mengalami penurunan kinerja dari tahun sebelumnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, komitmen organisasi dan kepatuhan terhadap peraturan terhadap kinerja perangkat daerah Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, menggunakan data primer dengan kuesioner sebagai alat pencari data. Model analisis data menggunakan regresi linier berganda yang diolah dengan software SPSS versi 25.0. Hasil penelitian membuktikan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja perangkat daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan kepatuhan terhadap regulasi tidak mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.



## 1. PENDAHULUAN

Instansi pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan dituntut untuk terus fokus mengupayakan perbaikan (Rohma et al., 2023). Sejalan dengan diberlakukannya perundang-undangan tentang tata kelola pemerintahan menjadi tuntutan seluruh instansi agar memiliki kinerja yang memuaskan (Kiri & Handayani, 2021). Kinerja yang gagal akan mendorong adanya perbaikan pada suatu indikator. Sedangkan kesuksesan kualitas kerja aparat pemerintah juga memerlukan apresiasi untuk meningkatkan produktivitasnya dan memperoleh dukungan dari masyarakat atas kinerja pemerintah (Rosita & Asrini, 2022). Peran kinerja aparatur daerah telah dituangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwasanya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien perlu untuk ditingkatkan. Kinerja aparatur daerah dapat dinilai melalui pengukuran *financial* dan *non-financial*, yang mana kinerja bisa dinilai berdasarkan kesanggupan pegawai saat meraih target yang dianggarkan (Adhivinna & Dinuriah, 2020). Hal ini dikarenakan, pengukuran kinerja menjadi dasar untuk mengetahui keberhasilan suatu organisasi. Pengukuran kinerja menjadi penting untuk mencapai pembaharuan disektor publik (Riawan, 2016).

Fenomena yang terjadi terkait dengan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu pada tahun anggaran 2021 mendapatkan hasil opini audit atas laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul. Semakin baik opini audit dari BPK seharusnya mencerminkan kinerja pemerintah yang semakin baik (Nurhayati, et al, 2019). Namun, BPK masih menemukan beberapa permasalahan pengelolaan keuangan daerah seperti pengelolaan izin dan pajak reklame belum tertib serta pengelolaan piutang daerah yang belum memadai. Hal serupa juga ditemukan oleh (Syukron & Sugiri, 2017), dimana penelitian yang dilakukan pada kabupaten Bantul menemukan bahwa proses pengawasan barang dan jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Bantul belum sesuai dengan Permen nomor 23 tahun 2007. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja masih belum optimal. Lebih lanjut lagi, berdasarkan Laporan Kinerja (LKJ) tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh penurunan pencapaian kinerja manajerial terhadap pemerintahan yang baik melalui perhitungan *Indonesian Governance Indeks* (IGI). IGI adalah alat ukur kinerja tata kelola pemerintahan terhadap empat pilar yaitu area pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. Menurut Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul, nilai prinsip transparansi tahun 2020 menurun sebesar 0,04 menjadi 7,89 dibanding tahun sebelumnya dimana nilai mencapai 7,93. Penurunan nilai ini dikarenakan terdapat beberapa arena pemerintahan yang belum menerapkan adanya kemudahan akses data. Berdasarkan fenomena ini tentu saja penilaian kinerja aparatur pemerintah masih perlu dilakukan.

Penilaian kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban moral seseorang menurut *stewardship theory*. *Stewardship theory* menyatakan bahwa *sterward* akan bertindak untuk kepentingan pemilik (masyarakat) (Davis, et al, 1997). Sehingga suatu individu akan terikat perjanjian dengan organisasi tempatnya bekerja. Oleh karena itu, kinerja aparatur daerah perlu dinilai guna mengetahui seperti apa aparatur pemerintah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Aspek pertama yang dapat dilihat untuk mengukur sejauh mana target kinerja dapat dicapai adalah melalui penilaian akuntabilitas. Ermino (2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas diartikan sebagai wujud pertanggungjawaban atas berhasil atau tidaknya organisasi dalam melaksanakan visi misinya untuk meraih tujuan dan sasaran organisasi menggunakan suatu media penilaian yang dilaksanakan secara periodik. Dalam organisasi publik, aparatur pemerintah harus memenuhi prinsip akuntabilitas puliblik terutama akuntabilitas kebijakan (Listira & Kristanto, 2018). Meningkatnya aspek akuntabilitas dalam penilaian tata kelola pemerintah yang baik dapat berdampak pada

tingginya usaha dalam pemberantasan korupsi (Mulya & Fauzihardani, 2022). Jika aparaturnya mempunyai akuntabilitas yang kuat, maka produktivitas kinerja dapat cenderung meningkat (bpkp.go.id).

Aspek transparansi juga dapat mempengaruhi kinerja suatu pemerintah daerah, dimana transparansi menjadi suatu hal penting dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Putra & Indraswarawati, 2021). Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengunggah informasi baik laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, maupun laporan kinerja sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Keterbatasan dalam mengakses suatu laporan pemerintahan dapat mengakibatkan tidak terwujudnya kondisi seimbang dalam mewujudkan relevansi dan keandalan informasi yang diakibatkan limitasi ataupun adanya alasan lain praktisi (Kusuma & Mildawati, 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa, semakin transparannya suatu informasi pengelolaan pemerintahan dan laporan keuangan, maka kinerja aparaturnya dapat meningkat secara lebih menyeluruh.

Aspek ketiga dalam penilaian kinerja aparaturnya dapat dilihat melalui bagaimana tingkat komitmen organisasinya. Suddin & Arno (2019) menjelaskan bahwa komitmen organisasi mengindikasikan tingkat keterikatan yang dimiliki setiap anggota terhadap suatu organisasi. Lebih lanjut, menurut (Ethika, et al, 2019) komitmen organisasi merupakan sikap dan perasaan karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Komitmen organisasi merupakan level kepercayaan seorang pegawai dalam berpihak pada organisasi tertentu dengan berniat untuk mempertahankan dan menjaga struktur keanggotaannya di dalam suatu organisasi. Apabila seseorang memiliki tingkat kepemilikan terhadap suatu organisasi yang tinggi, maka keterlibatan seseorang dalam bekerja akan tinggi (Rosita & Asrini, 2022).

Aspek keempat yang dapat mempengaruhi kinerja suatu pemerintah daerah yaitu kepatuhan terhadap regulasi. Regulasi atau peraturan yang dipatuhi oleh suatu instansi pemerintah dapat menjadikan laporan pertanggungjawaban yang dirancang menjadi akurat dan proporsional (Mulya & Fauzihardani, 2022; Rohma, 2023). Menurut Kusuma & Mildawati (2021), pengaplikasian *good governance* di Indonesia dianggap masih kurang memiliki peran untuk meningkatkan kinerja aparaturnya. Kepatuhan terhadap suatu regulasi dapat mendorong terwujudnya suatu program kerja sehingga apabila tingkat kepatuhan pemerintah terhadap regulasi tinggi, maka tujuan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja yang baik dapat tercapai.

Mengacu pada penelitian Rosita & Asrini (2022), penelitian ini adalah ingin menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, komitmen organisasi dan kepatuhan pada regulasi terhadap kinerja aparaturnya pemerintah daerah pada kabupaten Bantul. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini obyek penelitian yang berada pada OPD kabupaten Bantul dan menambahkan variabel kepatuhan pada regulasi. Kepatuhan pada regulasi merupakan suatu kepatuhan seseorang pada peraturan yang diatur oleh pemerintah untuk menciptakan ketertiban demi kelangsungan bangsa dan negara (Mulya & Fauzihardani, 2022). Penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung *stewardship theory* terkait dengan kinerja aparaturnya pemerintah yang menyatakan bahwa *steward* bertindak atas kepentingan *principle* sebagai bentuk tanggungjawab atas amanah yang diberikan.

## 2. KAJIAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

Perkembangan teori *stewardship* dilatar belakangi oleh ketidakpuasan dan selisih antara *agent* dan *principal* pada teori keagenan (Schillemans & Bjurström, 2020). Teori *stewardship* menurut Davis, et al. (1997) menjelaskan tentang kondisi seorang manajer yang tidak mementingkan tujuan personal, namun bertindak sebagai pengelola yang tujuan utamanya sejalan dengan tujuan *principal*-nya. Lebih lanjut lagi, menurut (Sutanto &

Hardiningsih, 2021) *stewardship theory* akan mendorong manajemen untuk berintegritas tinggi kepada organisasi untuk kepentingan bersama dibandingkan memenuhi kepentingan pribadi. Dalam teori *stewardship* ini, organisasi pemerintah akan bertindak sebagai *steward* yang memiliki tanggung jawab sebagaimana pengelola sumber daya publik sedangkan masyarakat berperan sebagaimana *principal* atau pemilik sumber tersebut. Dari sudut pandang sektor publik, akuntabilitas menjadi tanggung jawab organisasi pemerintah selaku pemegang amanah (*steward*) untuk memberikan pelaporan atas kegiatannya kepada masyarakat selaku pemberi amanah (*principal*) (Jatmiko, 2020). Teori ini juga mendeskripsikan bahwa pemerintah sebagai pihak yang mempunyai banyak informasi publik perlu menyampaikan kinerjanya kepada masyarakat dengan memberikan laporan keuangan yang akuntabel.

Komitmen organisasi menjadi bangunan multidimensial atas komitmen keberlanjutan yang mempresentasikan keinginan seseorang berada dalam organisasi tersebut dan melakukan penilaian komitmen atas kepercayaannya dalam menerima tujuan organisasi. Konsep ini merupakan bagian penting dalam profil psikologis mengenai *steward*. Pemerintah selaku instansi penampung aspirasi publik dan dipercaya oleh publik harus memberikan pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial. Penjelasan ini didukung oleh penelitian Maharani & Sari, (2021) yang menyebutkan bahwa teori *steward* menjadi teori yang dapat diaplikasikan untuk organisasi sektor publik.

Kinerja merupakan tingkat pencapaian, tampilan maupun prestasi dari sasaran dan tujuan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk kemudian dinilai berdasar pada ukuran penilaian kinerja (Akay et al., 2021). Kinerja organisasi pemerintah didefinisikan sebagai *output* kerja organisasi berdasar pada kedaulatan dan kewajiban tiap anggota untuk mencapai misi organisasi yang sesuai hukum, moral serta etika (Mete, 2020). Kinerja aparatur daerah adalah ilustrasi tentang berhasil atau tidaknya organisasi demi mewujudkan sasaran organisasi dan dalam rangka merealisasikan visi, misi serta strategi kegiatan sesuai program dan kebijakan yang berlaku (Rosita & Asrini, 2022). *Stewardship theory* menyatakan bahwa manajemen (aparatur) akan mementingkan kepentingan prinsipal (masyarakat) diatas kepentingan pribadi. sehingga aparatur akan berupaya untuk mewujudkan visi dan misi organisasi yang berorientasi kepada masyarakat sebagai penilaian kinerja organisasi.

Akuntabilitas merupakan suatu tanggung jawab pemerintah dalam mengatur sumber daya, memberikan pelaporan, dan menyampaikan seluruh kegiatan maupun program sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya kepada masyarakat selaku pemberi amanah (Dariana & Harrie, 2020). Secara luas akuntabilitas mencakup beberapa kriteria, yaitu *liability*, *transparency*, *responsibility*, *controllability* dan *responsiveness* (Muhammad et al., 2022). Akuntabilitas mengacu pada peranan pengawas dan peranan karyawan untuk dapat membentuk alur rencana dan anggaran program dengan baik. Berdasarkan *stewardship theory*, *steward* akan bertindak dengan untuk kepentingan (tanggungjawab) organisasi bukan untuk kepentingan individu. Sehingga akuntabilitas pada aparatur pemerintah daerah bertujuan untuk mencapai pelayanan publik secara maksimal yang kemudian diharapkan dapat memperbaiki kualitas kerja aparatur daerah (Novatiani et al., 2019). Hasil penelitian Putri (2021) menyimpulkan adanya pengaruh antara akuntabilitas publik dengan kinerja pemerintah. Apabila suatu instansi memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi dalam mengungkapkan dan menyajikan laporan kegiatan pemerintah, maka akan berpengaruh pada meningkatnya kinerja pemerintah yang lebih optimal (Suddin & Arno, 2019). Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan yaitu:

H<sub>1</sub>: Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja aparatur daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, keterbukaan atau transparansi didefinisikan sebagai penyampaian laporan keuangan secara transparan dan wajar terhadap publik dengan beranggapan bahwa masyarakat berhak mengetahui seluruh laporan pertanggung jawaban aparatur daerah dalam mengelola sumber daya publik dengan mematuhi regulasi yang sedang berlaku. Keterbukaan merupakan kunci bagi aparatur selaku pemegang amanah (*steward*) dalam setiap pelaporan yang diberikan berdasarkan *stewardship theory*. Keterbukaan (transparansi) dapat terwujud apabila laporan keuangan pemerintah disajikan dengan tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Transparansi publik yang meningkat mengindikasikan bahwa masyarakat merasa puas akan kinerja aparatur daerah (Defitri, 2022). Hasil penelitian Rosita & Asrini (2022) menunjukkan adanya pengaruh antara transparansi dengan kinerja aparatur daerah. Semakin transparans suatu informasi kepada publik, maka akan semakin baik juga kinerja aparatur daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan yaitu:

H<sub>2</sub>: Transparansi publik berpengaruh terhadap kinerja aparatur daerah

Komitmen organisasi menjadi nilai individual yang mereplikasikan tingkat kesetiaan seseorang atas keterlibatannya dalam suatu organisasi atau perusahaan (Annisa et al., 2020). Komitmen organisasi yang meningkat dapat membentuk pandangan positif seseorang yang tergabung dalam organisasi pemerintahan. *Stewardship theory* menyatakan bahwa keputusan *steward* untuk bergabung dalam sebuah organisasi merupakan keputusan pribadi berdasarkan penilaiannya terhadap tujuan organisasi. Sehingga semakin tinggi komitmen atau keyakinan seseorang dalam mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi, maka motivasinya dalam bekerja juga tinggi dan akan berdampak pada kinerjanya (Sembiring, 2020). Hasil penelitian Tahar & Kuncahyo (2020) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kinerja aparatur daerah. Jika seseorang memiliki rasa keterikatan yang tinggi pada organisasinya, maka kualitas kerja yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan meningkat. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan yaitu:

H<sub>3</sub>: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparatur daerah

Kepatuhan regulasi atau peraturan perundangan adalah wujud kepatuhan organisasi terhadap kebijakan yang dibentuk oleh aparatur negara secara konstan sehingga pemerintah dapat mencapai pertanggung jawaban kinerja dengan baik (Dewata et al., 2020). Berdasarkan *stewardship theory*, aparatur pemerintah menyakini jika mereka pengemban amanah (*steward*) yang harus patuh terhadap peraturan yang ada untuk kepentingan organisasi. Salah satu peraturan terkait dengan pengelolaan pemerintah daerah adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP terbentuk dari berbagai peraturan yang disesuaikan dengan aturan hukum negara dan perangkat peraturan pemerintah. Sehingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menaati regulasi yang berlaku agar dapat menekan terjadinya penyimpangan. Melalui ketaatan ini, pemerintah dapat meningkatkan keberhasilan kinerja organisasinya (Asmawanti et al., 2020). Hasil penelitian Dariana & Harrie (2020) menunjukkan bahwa kepatuhan pada regulasi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Apabila tingkat kepatuhan regulasi meningkat, maka kinerja aparatur dapat turut meningkat. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan yaitu:

H<sub>4</sub>: Kepatuhan regulasi berpengaruh terhadap kinerja aparatur daerah

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data primer dengan bantuan kuesioner untuk pengambilan data dan teknik analisis regresi linier untuk menguji hipotesis penelitian menggunakan bantuan alat uji statistik SPSS. Penelitian dilakukan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada wilayah kabupaten Bantul. Terdapat 24

OPD yang ada pada wilayah kabupaten Bantul. Pengambilan data dilakukan menggunakan kuesioner yang disebarkan secara langsung kepada responden. Penentuan responden pada penelitian ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yaitu kepala badan/dinas, kepala sub bagian, sekretaris, bendahara dan sub bagian. kepala dinas dipilih karean berdasarkan PP kepala dinas Kepala dinas melaksanakan fungsi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi kinerja pemerintahan. Sedangkan pemilihan sampel kepala sub bagian, sekretaris, bendahara dan staf didasarkan pada fungsi dan tanggung jawabnya yang mana berhubungan langsung dengan kinerja setiap OPD.

Teknik pengumpulan sampel dalam pemilihan responden pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu mengacu pada kriteria dan pertimbangan khusus yang peneliti telah tentukan. Kriteria pengambilan sampel untuk penelitian ini yaitu yang pertama perangkat daerah dipilih mengacu pada organisasi yang memiliki tanggung jawab melaksanakan pengelolaan anggaran dari aparatur daerah. Kedua pegawai menempati jabatan sebagai kepala dinas atau badan daerah, kepala sub bagian, sekretaris, bendahara, dan sub bagian. ketiga pegawai yang memiliki masa jabatan minimal 1 tahun masa kerja. Dan terakhir pegawai yang memiliki latarbelakang pendidikan terakhir minimal D3.

Pertanyaan dalam angket atau kuesioner penelitian ini diukur menggunakan *likert scale* dengan poin 5 (lima). Penilaian mencakup poin 1 sampai dengan poin 5. Secara berurutan poin 1 untuk pilihan Sangat Tidak Setuju (STS), poin 2 Tidak Setuju (TS), poin 3 Netral (N), poin 4 Setuju (S), dan poin 5 Sangat Setuju (SS). Pengolahan data dalam penelitian ini memakai program *SPSS Versi 25.0* untuk menganalisis data yang diperoleh.

**Tabel 1. Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Instrumen
Akuntabilitas	1. Tanggung jawab dan tepat waktu, 2. Pelayanan lebih baik, 3. Hukum atau sanksi, dan 4. Tugas dilaksanakan dengan baik.
Transparansi	1. Publikasi, 2. Keterbukaan, dan 3. Aksesibilitas.
Komitmen Organisasi	1. Komitmen efektif, 2. Komitmen keberlanjutan, dan 3. Komitmen normatif.
Kepatuhan pada Regulasi	1. Kepatuhan dalam pelaksanaan akuntabilitas. 2. Sanksi apabila tidak mentaati peraturan, 3. Kepatuhan terhadap regulasi laporan keuangan dan kinerja aparatur daerah.
Kinerja aparatur daerah	1. Hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi, 2. Keberhasilan sebuah organisasi, 3. Pencapaian dari organisasi.

Sumber: Alqurani (2020), Dinuriah (2020), dan Dewata, et al, (2020).

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Tabel 2. Data Profil Responden**

Karakteristik	Kategori	Jumlah	%
Jenis Kelamin	Laki-laki	47	45%

	Perempuan	57	55%
Usia Pegawai	21 - 30 tahun	17	16%
	31 - 40 tahun	35	34%
	41 - 50 tahun	28	27%
	≥ 51 tahun	24	23%
Tingkat Pendidikan	D3	24	23%
	S1	59	57%
	S2	20	19%
	S3	1	1%
Jabatan	Kepala Badan/Dinas/Instansi	0	0%
	Kasubag/Kasubid	33	32%
	Sekretaris	10	10%
	Bendahara	14	13%
	Subag	47	45%
Lama Bekerja	1 - 10 tahun	41	39%
	11 - 20 tahun	33	32%
	21 - 30 tahun	24	23%
	≥ 31 tahun	6	6%

Sumber: hasil pengolahan data primer tahun 2023.

Berdasarkan hasil distribusi kuesioner diperoleh data responden sebanyak 104. Responden laki-laki berjumlah 47 dengan tingkat persentase sebesar 45%. Sedangkan responden jenis kelamin perempuan berjumlah 57 atau sama dengan 55%. Maka diketahui responden perempuan lebih mendominasi dibanding responden laki-laki. Karakteristik responden berdasarkan usia yaitu kategori usia 31 – 40 tahun dengan persentase 34% atau paling banyak dibanding kategori usia yang lain. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan paling banyak adalah tingkat pendidikan S1 sebanyak 59 responden atau setara 57%. Pada karakteristik jabatan responden, menunjukkan bahwa pada kategori jabatan terbanyak adalah Subag dimana data responden diperoleh sebanyak 47 dengan tingkat persentase 45%. Karakteristik terakhir adalah masa bekerja, dimana menurut data diatas pada kategori 1 – 10 tahun merupakan perolehan data terbanyak yakni 41 (39%).

Melalui pengujian validitas, maka dapat diketahui apakah instrumen penelitian dapat dikatakan valid atau tidak. Uji validitas ini diukur berdasarkan nilai *pearson correlation*.

**Tabel 3. Validitas Variabel Dependen (Y)**

	Nomor	<i>Pearson correlation</i>	<i>Sig. (2 tailed)</i>
Kinerja aparatur daerah	Y1	0,635**	0,000
	Y2	0,749**	0,000
	Y3	0,692**	0,000
	Y4	0,735**	0,000
	Y5	0,513**	0,000
	Y6	0,573**	0,000
	Y7	0,683**	0,000
	Y8	0,694**	0,000
	Y9	0,609**	0,000
	Y10	0,718**	0,000

Sumber: hasil pengolahan data primer tahun 2023.

Suatu indikator penelitian dikatakan valid apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau 5% (Ghozali, 2018). Berdasarkan hasil uji validitas diatas, keempat instrumen penelitian dalam masing-masing dinyatakan valid. Melalui pengujian reliabilitas, maka dapat diketahui apakah suatu variabel penelitian dinyatakan handal atau tidak dengan mengacu pada hasil uji *Cronbach's Alpha*.

**Tabel 4. Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Hasil
Akuntabilitas	0,867	Reliabel
Transparansi	0,837	Reliabel
Komitmen Organisasi	0,838	Reliabel
Kepatuhan Regulasi	0,810	Reliabel
Kinerja aparatur daerah	0,857	Reliabel

Sumber: hasil pengolahan data primer tahun 2023.

Diketahui nilai *cronbach's alpha* > 0,70. Variabel penelitian akan dinyatakan reliabel jika hasil *cronbach's alpha* lebih dari 0,70 (Ghozali, 2018). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas pada keempat variabel diatas dinyatakan handal atau reliabel.

**Tabel 5. Uji Hipotesis**

Model	$\beta$	t	Sig
(constant)	4,220	1,067	0,289
Akuntabilitas	0,198	2,164	0,033
Transparansi	0,277	3,078	0,003
Komitmen Organisasi	0,239	3,818	0,000
Kepatuhan Regulasi	0,285	1,740	0,085
F Hitung = 24,951			
<i>Adjusted R Square</i> = 0,482			

Sumber: hasil pengolahan data primer tahun 2023.

Berdasarkan tabel 5 uji hipotesis, hasil olah data menggunakan alat uji statistik SPSS pada penelitian ini yang menguji pengaruh variabel variabel independen yaitu akuntabilitas ( $X_1$ ), transparansi ( $X_2$ ), komitmen organisasi ( $X_3$ ) dan kepatuhan regulasi ( $X_4$ ) terhadap variabel dependen kinerja aparatur daerah (Y) dapat ditarik sebuah persamaan regresi yaitu :

$$Y = 4,220 + 0,198X_1 + 0,277X_2 + 0,239X_3 + 0,285X_4 + \varepsilon$$

Hasil F hitung diketahui 24,951 dengan taraf signifikan sebesar 0,000 dimana <0,05 atau dapat dikatakan uji regresi ini mampu memprediksi kinerja aparatur daerah sehingga hasil uji F menyatakan akuntabilitas, transparansi, komitmen organisasi, dan kepatuhan regulasi berpengaruh simultan terhadap kinerja aparatur daerah. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,482, maka tingkat pengaruh akuntabilitas, transparansi, komitmen organisasi, dan kepatuhan regulasi terhadap kinerja aparatur daerah Kabupaten Bantul sebesar 48,2% serta selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Menurut hasil uji hipotesis akuntabilitas ( $X_1$ ) terhadap kinerja aparatur daerah (Y), diperoleh signifikansi sebesar 0,033 yang berarti hipotesis  $H_1$  didukung, oleh karena itu disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh pada kinerja aparatur daerah Kabupaten Bantul. Apabila tingkat pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat atas program kerja dan pengungkapan laporan keuangannya semakin akuntabel, maka akan semakin optimal juga kualitas kinerjanya (Suddin & Arno, 2019). Hasil tersebut sejalan dengan *stewardship theory* menyatakan bahwa *steward* (aparatur) akan bertindak untuk kepentingan

*principal* (masyarakat) dan bukan atas kepentingan pribadi. Hal ini diaplikasikan sikap akuntabilitas dari aparatur pemerintah sebagai pemegang amanah (*steward*) untuk memberikan pelaporan atas program kegiatan yang dilakukan maupun pengelolaan keuangannya kepada masyarakat selaku pemberi amanah (*principal*) (Jatmiko, 2020). Adanya akuntabilitas publik juga dapat menjadi bukti bahwa pemerintah menyelesaikan tugas sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Adyaksana & Alqurani, 2020). Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2021), Mete (2020) dan Umar (2018) yang menyatakan akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kinerja aparatur daerah.

Hasil pengujian hipotesis transparansi ( $X_2$ ) terhadap kinerja aparatur daerah (Y), diperoleh signifikansi sebesar 0,003 yang berarti hipotesis  $H_2$  didukung, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara transparansi terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini berarti, semakin transparan informasi publik maka performa kerja pemerintah daerah juga akan meningkat. Aparatur pemerintah sebagai pihak pemegang amanah (*steward*) memiliki banyak informasi terkait program kegiatan dan pengelolaan keuangan yang harus dilaporkan kepada masyarakat (*principal*). Putri (2021) mengatakan bahwa informasi publik yang semakin transparan akan membuat masyarakat percaya bahwa pemerintah mampu menyelenggarakan pemerintahan dan mampu mengelola keuangan sehingga terwujud kinerja aparatur yang optimal. Sehingga kunci sukses atas pelaporan yang diberikan oleh adalah transparansi yang dimiliki oleh aparatur pemerintah. Pelaporan yang menyeluruh atas informasi yang dimiliki kepada publik akan mewujudkan aksesibilitas informasi, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (Damayanti & Hermanto, 2018). Hasil penelitian ini mendukung hasil riset Rosita & Asrini (2022), Defitri (2022) dan Jatmiko (2020) yang mengatakan terdapat pengaruh antara transparansi publik terhadap kinerja aparatur daerah.

Hasil pengujian hipotesis komitmen organisasi ( $X_3$ ) terhadap kinerja aparatur daerah (Y), diperoleh signifikansi sebesar 0,000 yang berarti hipotesis  $H_3$  didukung, maka dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparatur daerah Kabupaten Bantul. Artinya, apabila pegawai mempunyai keterikatan kuat terhadap instansinya maka hal ini dapat meningkatkan kinerja aparatur daerah (Suddin & Arno, 2019). Berdasarkan data yang diperoleh, lebih dari 50% responden mempunyai masa kerja diatas 10 tahun. Penelitian milik Siregar (2020) menyatakan bahwa masa kerja dapat mempengaruhi komitmen individu terhadap organisasinya. Pernyataan ini diperkuat kembali dengan penelitian Robbins (2001) yang menerangkan jika semakin lama masa kerja pegawai maka semakin kuat keinginannya untuk terus meningkatkan kinerjanya. Sejalan dengan *stewardship theory* yang menyatakan bahwa *steward* sebagai pengemban amanah akan bertindak atas kepentingan organisasi sebagai wujud tanggungjawab kepada *principle*. Hal ini tentu saja harus dilandasi oleh komitmen yang tinggi kepada organisasi, hal sebaliknya justru yang akan terjadi jika *steward* tidak memiliki komitmen terhadap organisasi maka *steward* akan bertindak untuk kepentingan diri sendiri. Lebih lanjut (Raharjo, 2007) menjeaskan bahwa komitmen pegawai terhadap organisasi menjadi hal yang dapat mempresentasikan keinginan seseorang untuk berada dalam organisasi tersebut dan melakukan penilaian komitmen atas kepercayaan dalam mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini mendukung penelitian milik Rosita & Asrini (2022), Sembiring (2020) dan Annisa, et al, (2020) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah.

Hasil pengujian hipotesis kepatuhan regulasi ( $X_4$ ) terhadap kinerja aparatur daerah (Y) diperoleh signifikansi sebesar 0,085 yang berarti hipotesis  $H_4$  tidak didukung, oleh karena itu variabel kepatuhan regulasi tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur daerah Kabupaten Bantul. Artinya, tidak terdapat pengaruh yang kuat antara kepatuhan regulasi terhadap peningkatan kualitas kinerja aparatur daerah. Hasil tersebut tidak searah dengan hasil milik

Asmawanti, et al, (2020), Dariana & Harrie (2020) dan Dewata, et al, (2020) yang menemukan bahwasanya terdapat pengaruh antara kepatuhan regulasi atau peraturan yang berlaku terhadap kinerja aparatur daerah. Adanya kepatuhan OPD terhadap peraturan perundangan terkait keuangan dan kinerja tidak dapat menjamin adanya peningkatan kualitas kinerja organisasi. Hal ini dapat terjadi karena tidak semua responden penelitian memahami pembaharuan regulasi terkait pembuatan laporan keuangan dan kinerja. Mengingat 45% jabatan yang mengisi kuesioner adalah Sub Bagian sedangkan Bendahara atau Bagian Keuangan sebesar 13%. Menurut Wungow, dkk (2016), jabatan pengelola keuangan diduduki oleh mereka yang mampu melaksanakan fungsi dan tugas pokok dengan benar serta mampu menyusun laporan keuangan sesuai regulasi yang berlaku pada saat itu.

## 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparatur daerah pada kabupaten Bantul. Sedangkan, kepatuhan regulasi tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur daerah pada kabupaten Bantul. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain: instrumen hanya didistribusikan secara *hardfile* kepada responden tanpa melakukan wawancara, pendistribusian kuesioner untuk kategori responden Kepala Dinas/Badan tidak tersampaikan sehingga data kurang bervariasi, dan populasi penelitian belum melibatkan perangkat daerah seperti kantor kecamatan. Oleh karena itu diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk menjadikan wawancara dalam metode penelitian agar hasil yang didapatkan lebih komprehensif. Penyebaran kuesioner perlu secara merata berdasarkan kategori responden agar data lebih bervariasi dan hasil lebih relevan. Populasi penelitian juga dapat diperluas hingga ke perangkat kecamatan ataupun instansi pemerintah yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhivinna, V. V., & Dinuriah, A. S. (2020). Apa yang mempengaruhi kinerja aparatur Pemerintah Daerah? *Journal of Business and Information Systems*, 2(1), 46–54. <https://doi.org/10.36067/jbis.v2i1.59>
- Adyaksana, R. I., & Alqurani, L. (2020). Meningkatkan kinerja aparatur daerah dengan transparansi dan akuntabilitas. *Journal of Business and Information Systems*, 2(2), 85–94. <https://doi.org/10.36067/jbis.v2i2.74>
- Akay, R., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2021). Kinerja Pemerintah dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Sinonsayang. *Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tikala*, 1(1), 1–8.
- Annisa, F., Sariningsih, E., & Luthfi, M. (2020). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Profesionalisme Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Pesawaran). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.51877/jiar.v3i2.149>
- Asmawanti, D., Sari, A. M., Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 85–94. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1850>
- Damayanti, E., & Hermanto, S. B. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(3), 1–21.
- Dariana, D., & Harrie, A. M. (2020). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Good Governance) Pada

- Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 124–139. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.224>
- Davis, J. H., F. D. Schoorman, and L. D. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. <https://doi.org/10.2307/259223>
- Defitri, S. Y. (2022). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja aparatur daerah (Studi Empiris Pada OPD di Kota Solok). *Jurnal Ekonomia*, 12(1), 58–72.
- Dewata, E., Sari, Y., Jauhari, H., Lestari, T. D., & Sriwijaya, P. N. (2020). Ketaatan pada peraturan perundangan, sistem pelaporan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 541–550.
- Ermino, R. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas, Transparansi, dan Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(2), 181.
- Ethika, Herawati, & Hidayat, R. (2019). The Influence Of Work Environment, Compensation, Organizational Commitment, Motivation, Job Satisfaction On Individual Performance In Cooperatives In Padang West Sumatra. *InFestasi*, 15(1), 83 - 90.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan IBM SPSS 25 Edisi 9*.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja aparatur daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231–246. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- Kiri, S. H. P., & Handayani, N. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi publik serta fungsi pemeriksaan inten terhadap kinerja pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(8).
- Kusuma, A. F., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(9).
- Listira, J. C., & Kristanto, S. B. (2018). Dampak Prosedur dan Reviu Inspektorat Terhadap Peningkatan Akuntabilitas LKPD Provinsi Banten. *InFestasi*, 14(1), 23 – 28.
- Maharani, Y., & Sari, R. (2021). Konsep Value For Money untuk Pengukuran Kinerja pada Kantor Imigrasi Pangkalpinang. *Jurnal IAKP*, 2(1), 97–103.
- Mete, D. D. (2020). Pengaruh pengawasan fungsional, transparansi publik, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparatur daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(10), 1–23.
- Muhammad, F. F., Lutfillah, N. Q., & Sulistiono, S. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Limbah Berbasis Nilai Kejujuran. *InFestasi*, 18(1), 37-48.
- Mulya, H. G., & Fauzihardani, E. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 192–212. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i1.463>
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51–62. <https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>
- Nurhayati, N., Rizani, F., & Kadir. (2019). Perbandingan Kinerja Pemerintah Daerah Di Indonesia. *InFestasi*, 15(1), 67 - 82.
- Peraturan Pemerintah. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*.
- Peraturan Pemerintah. (2016). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah*.

- Putra, P. D. S., & Indraswarawati, S. A. P. A. (2021). Pengaruh pengawasan keuangan daerah, transparansi pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten klungkung. *Widya Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 79-92.
- Putri, O. B. (2021). Pengaruh transparansi, budaya organisasi dan akuntabilitas terhadap kinerja aparatur daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(11).
- Riawan. (2016). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Yang Dimoderasi Dengan SIMDA Pada SKPD Kabupaten Buton Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan*, 8(1), 50-60. <https://doi.org/10.17977/um002v8i12016p050>
- Robbins, S. P. (2001). *Perilaku Organisasi. Alih Bahasa Hadyana Pujaatmaka dan Benyamin Molan*. PT Prenhalindo.
- Rohma, F. F. (2023). Efektivitas Informasi dan Komunikasi dalam Memitigasi Tendensi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 1-13.
- Rohma, F. F., Shofiyah, I., & Junaedi, A. S. (2023). The Effect of Tournament Horizon, Faultline and Group Performance Relationships under Decentralized System. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 38(1), 62-80.
- Rosita, R., & Asrini, A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja aparatur daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Provinsi Jambi). *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(1), 133. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.377>
- Schillemans, T., & Bjurström, K. H. (2020). Trust and verification: balancing agency and stewardship theory in the governance of agencies. *International Public Management Journal*, 23(5), 650-676. <https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1553807>
- Sembiring, L. D., Sudirman, A., & Silitonga, H. P. (2020). Dampak kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah Kota Pematangsiantar. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 436-445.
- Siregar, N. A. (2020). Pengaruh Masa Kerja , Kepuasan Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Komitmen Organisasi pada PT . *Lingga Tiga Sawit Sigambal*. 11(1), 30-38.
- Suddin, S. sukarna, & Arno. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta). *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST)*, 70(8), 827-838.
- Sutanto, H., & Hardiningsih, P. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19. *InFestasi*, 17(1), 1-10.
- Syukron, A. M., & Sugiri, S. (2017). Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Dalam Pengawasan Proses Pengadaan Barang/Jasa. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(2). doi:10.22146/abis.v5i2.59291
- Tahar, A., & Kuncahyo, H. H. (2020). Pengaruh Komitmen Organisasi, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Kompensasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(2), 45-55.
- Umar, Z. (2018). Pengaruh dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh. *Kolegial*, 6(2), 136-148.
- Wungow, J. F., Lambey, L., & Pontoh, W. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Pelatihan Dan Jabatan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 7(2), 174-188. <https://doi.org/10.35800/jjs.v7i2.13560>